

**PENGAWASAN DPRD KOTA PADANG TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN WALIKOTA PADANG ATAS
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018
– 2020**

EXECUTIVE SUMMARY

*Di ajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

SINDY PERMATA SARI
1810012111018

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**UNIVERSITAS BUNG HATTA
FAKULTAS HUKUM
PADANG
2021**

No. Reg : 20/skripsi/HTN/FH/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg : 20/Skipssi/HTN/FH/II-2022

Nama : **SINDY PERMATA SARI**
Nomor : **1810012111018**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Pengawasan DPRD Kota Padang terhadap Laporan Pertanggung
Jawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota Padang Atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2018-2020**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.

(Pembimbing) 

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr. Tamin Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H.)

PENGAWASAN DPRD KOTA PADANG TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN WALIKOTA PADANG ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018 – 2020

Sindy Permata Sari¹, Dr. Boy Yendra Tamin¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.
Email : sindypermatasari48@gmail.com

ABSTRACT

In carrying out its functions, the DPRD has the function of forming regional regulations, budgeting and supervision. is (APDB). The role of the DPRD in supervising the regional regulations of the APBD is expected not to 'trail' or bring down opponents but to keep the regional government or executive from carrying out their duties properly. on the Implementation of the 2018-2020 Regional Revenue and Expenditure Budget, 2) What are the obstacles faced by the Padang City DPRD against the Padang Mayor's Year-End Accountability Report on the Implementation of the 2018-2020 Regional Revenue and Expenditure Budget, 3) What are the efforts carried out by the DPRD in Supervising the Padang Mayor's Year-End Accountability Report for the Implementation of the 2018-2020 Regional Revenue and Expenditure Budget. The type of research is sociological juridical. Sources of data are primary data and secondary data with data collection techniques are interviews and document studies, data analysis in a qualitative way. Based on the research, the DPRD as an element of regional government administration has carried out its supervisory duties.

Keywords : DPRD, APBD, Supervision

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penempatan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah secara normatif mempunyai peranan jauh lebih besar dibandingkan periode sebelumnya dan berkedudukan setara dan menjadi mitra pemerintah daerah. Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.¹

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan mempunyai fungsi yang berbeda DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran (*budgeting*) dan pengawasan (*controlling*). Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah antara lain diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Semua itu merupakan tugas dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), termasuk BPKAD Kota Padang yang memiliki dua fungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan

Keuangan Daerah (SKPKD).²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengawasan DPRD Kota Padang terhadap laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota Padang atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 – 2020?
2. Apa saja Kendala – kendala yang dihadapi DPRD Kota Padang terhadap laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota Padang atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018-2020?
3. Upaya apa saja yang dilakukan DPRD dalam Mengawasi laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota Padang atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018-2020 ?

¹ Dasril Radjab, 2018, 'Pergeseran Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah untuk Memperkuat Kedudukan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah', *Wajah Hukum*, Volume II, Nomor 1 April 2018, hlm. 10

²Diga Putri Oktaviane, 2021. 'Evaluasi Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Menurut Perspektif Balanced Scorecard', *JESS (Journal of Education on Social Science)*, Volume VI, Nomor 1 2021, hlm 109

C. Tujuan Penelitian

4. Untuk Menganalisa Pengawasan DPRD Kota Padang terhadap laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota Padang atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 – 2020
5. Untuk Menganalisa Kendala – kendala yang dihadapi DPRD Kota Padang terhadap laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota Padang atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018-2020
6. Untuk Menganalisa Upaya yang dilakukan DPRD dalam Mengawasi laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota Padang atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018-2020

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya³. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung dari lapangan, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Serta analisa data menggunakan metode analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan DPRD Kota Padang terhadap laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota Padang atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 – 2020

Pengawasan atas pelaksanaan APBD Kota Padang yang dilakukan oleh DPRD, yang mana bertujuan untuk mengawal pelaksanaan anggaran dalam pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan kesejahteraan masyarakat serta berjalannya pemerintahan sesuai dengan pengelolaan pemerintahan yang baik.

B. Kendala – kendala yang dihadapi DPRD Kota Padang terhadap Laporan Pertanggung Jawaban akhir tahun

³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15.

Anggaran Walikota Padang atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 – 2020

1. Waktu pembahasan dari deadline secara regulasi mengharuskan DPRD segera membahas
2. Secara teknis waktu yang tersedia dari DPRD itu tidak bisa untuk mengoptimalkan secara lebih banyak laporan – laporan kegiatan dan program – program kinerja pemerintah ke lapangan, karena agenda DPRD yang sudah tersusun dan ketersediaan waktu yang terbatas
3. Perlu adanya perbandingan atau kajian – kajian yang lebih dalam dari para pakar atau pengamat, karena selama ini belum bisa\ mendapat perhatian dari kelompok diluar.⁴

C. Upaya yang dilakukan DPRD Kota Padang terhadap Laporan Pertanggung Jawaban akhir tahun Anggaran Walikota Padang atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 – 2020

1. Dalam Laporan Pertanggung Jawaban kepada walikota Padang, DPRD Kota Padang meminta untuk bisa segera memberikan Laporan Pertanggung Jawabannya segera dijadwal yang sudah ditentukan
2. Dalam pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban DPRD Kota Padang memintai kepada Walikota Padang untuk menyusun agenda sesuai dengan waktu yang ditentukan agar DPRD bisa mengamati, mengevaluasi dan juga turun ke lapangan untuk melihat secara langsung mengenai kegiatan dari hasil laporan tersebut.
3. Untuk mengoptimalkan kinerja DPRD Kota Padang meminta bantuan dari Pakar – pakar ekonomi, hukum dan keuangan dalam bentuk masukan yang bisa dijadikan perbandingan atau koreksi dari laporan tersebut.⁵

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Padang akhir tahun, berupaya mendeskripsikan manajemen pembangunan kota yang dikelola, dimulai dari penetapan rencana, implementasi,

⁴ Hasil wawancara dengan Arnedi Yarmen Wakil Ketua DPRD Kota Padang 29 Januari 2022

⁵ Hasil wawancara dengan Arnedi Yarmen Wakil Ketua DPRD Kota Padang 29 Januari 2022

pengawasan dan pengendalian, sampai pada capaian output, hasil, manfaat dan dampak penyelenggaraan pemerintah dalam satu tahun terakhir.

2. Kendala – kendala yang dihadapi DPRD Kota Padang terhadap Laporan Pertanggung Jawaban akhiri tahun Anggaran Walikota Padang atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 – 2020 :

- 1) Waktu pembahasan dari deadline secara regulasi mengharuskan DPRD segera membahas
- 2) Secara teknis waktu yang tersedia dari DPRD itu tidak bisa untuk mengoptimalkan secara lebih banyak laporan – laporan kegiatan dan program – program kinerja pemerintah ke lapangan, karena agenda DPRD yang sudah tersusun dan ketersediaan waktu yang terbatas
- 3) Perlu adanya perbandingan atau kajian – kajian yang lebih dalam dari para pakar atau pengamat, karena selama ini belum bisa mendapat perhatian dari kelompok diluar.

Upaya yang dilakukan DPRD Kota Padang terhadap Laporan Pertanggung Jawaban akhir tahun Anggaran Walikota Padang atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 – 2020

- 1) Dalam Laporan Pertanggung Jawaban kepada walikota Padang, DPRD Kota Padang meminta untuk bisa segera memberikan Laporan Pertanggung Jawabannya segera dijadwal yang sudah ditentukan
- 2) Dalam pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban DPRD Kota Padang memintai kepada Walikota Padang untuk menyusun agenda sesuai dengan waktu yang ditentukan agar DPRD bisa mengamati, mengevaluasi dan juga turun ke lapangan untuk melihat secara langsung mengenai kegiatan dari hasil laporan tersebut.
- 3) Untuk mengoptimalkan kinerja DPRD Kota Padang meminta bantuan dari Pakar – pakar ekonomi, hukum dan keuangan dalam bentuk masukan yang bisa dijadikan perbandingan atau koreksi dari laporan tersebut.

B. Saran

- 1) Anggota DPRD Kota Padang diharapkan

dapat meningkatkan pengawasan terhadap anggaran dan APBD dalamii menjalan tugas pengawasan.

- 2) Supaya anggota DPRD mendapatkan tambahan tenaga ahli dalam membantu DPRD melaksanakan perancangan APBD yang kebijakannya menjadi prioritas umum dalam menyusun anggaran dan pemerintah daerah diharapkan untuk lebih terbuka mengenai masalah pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan, juga menjadikan APBD sebagai prioritas dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
- 3) Berdasarkan laporan pertanggung jawaban akhir tahun walikota Padang terhadap pengawasan anggaran dana APBD yaitu LKPJ penulis mengharapkan untuk kedepannya DPRD evaluasi di setiap kegiatan rancangan APBD dalam masalahi pengawasani anggarani dana APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku – buku
 - Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- B. Peraturan Perundang-Undangan
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
- C. Sumber Lain :
 - Dasril Radjab, 2018, ‘Pergeseran Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah untuk Memperkuat Kedudukan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah’, *Wajah Hukum*, Volume II, Nomor 1 April 2018
 - Diga Putri Oktaviane, 2021. ‘Evaluasi Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Menurut Perspektif Balanced Scorecard’, *JESS (Journal of Education on Social Science)*, Volume VI, Nomor 1 2021

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Boy Yendra Tamin S.H., M.H selaku pembimbing penulis yangi sudah meluangkan waktu dan memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi maupun artikel dengan baik.